

**EFEKTIVITAS ORGANISASI DEWAN ADAT DAYAK DALAM MENUNJANG  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN DELTA PAWAN  
KABUPATEN KETAPANG**

Oleh :  
**VIVALDUS RESITUTA DUNSTAN ALEMMANTARA**  
E1031151013

**Dr. Yulius Yohanes, M.Si Bima Sujendra, S.IP, M.Si**

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Email : [vivaldusalemmantara@gmail.com](mailto:vivaldusalemmantara@gmail.com)

**Abstrak**

Penulisan skripsi ini di angkat berdasarkan deskripsi dan analisis yang berkaitan dengan Efektivitas Organisasi Dewan Adat Dayak dalam Menunjang Pelaksanaan otonomi Daerah di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Dewan Adat Dayak dengan indikator penyelesaian masalah Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Peneliti menggunakan menggunakan teori Efektivitas organisasi Menurut Ducan yaitu: 1) Pencapaian Tujuan, Dalam hal ini keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. 2) Integrasi, bagaimana pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam Perusahaan dan organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi. 3) Adaptasi, adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh individu untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan Organisasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsif dengan metode kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Wakil ketua I, II dan Sekretaris Dewan Adat Dayak, Kepala Sub Bagian otonomi Daerah Kabupaten Ketapang, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang dan Dua orang Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Ketapang. Sebagai kesimpulan peneliti adalah Efektivitas dalam pencapaian tujuan Dewan Adat Dayak belum terealisasi dengan baik dikarenakan Strategi Dewan Adat Dayak masih kurang efektif, sosialisasi yang dilakukan Dewan Adat Dayak pun masih kurang, karena sosialisasi terkesan sebentar dan tidak formal. Semestinya, dalam mencapai tujuan Dewan Adat Dayak harus bisa dapat merumuskan dan merencanakan strategi secara matang, dengan mempersiapkan strategi cadangan bila mana terjadi peristiwa perusahaan menolak hukum adat.

Kata Kunci : Efektivitas Organisasi, Dewan Adat Dayak, dan teori Ducan.

**THE EFFECTIVENESS OF DAYAK TRIBAL COUNCIL ORGANIZATIONS  
IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL  
AUTONOMY IN DELTA PAWAN DISTRICT  
KETAPANG REGENCY**

**Abstract**

The writing of this thesis is based on the description and analysis relating to the effectiveness of the Dayak Tribal Council's Customary Organizations in Supporting the implementation of Regional Autonomy in the Delta Pawan District, Ketapang Regency. This study aims to describe and analyze how well the Dayak Tribal Council's effectiveness is with indicators of problem-solving, goal achievement, integration, and adaptation. The researcher used Duncan's Organizational Effectiveness Theory which includes: (1) Achievement of Goals which is the whole process of efforts to achieve goals; (2) Integration which includes socialization procedures and processes, is a measurement of the level of ability in conducting socialization, developing consensus on collective agreements, and communication with various companies and other organizations; (3) Adaptation which is an adjustment process carried out by individuals to adjust to changes that occur in the organizational environment. This research employed descriptive research with qualitative methods. The subjects of this study were Deputy Chair I, Deputy Chair II and Secretary of the Dayak Indigenous Council, Head of the Regional Autonomy Subdivision, Head of the Office of National and Political Unity, and two people from the Dayak Indigenous people in Ketapang Regency. The researcher concludes that the effectiveness in achieving the objectives of the Dayak Tribal Council has not been realized properly because the Dayak Council Strategy was still lacking. The socialization carried out was considered too short and informal. In achieving the objectives of the Dayak Council it must be able to formulate and plan a strategy carefully by preparing a backup strategy if the companies reject customary law provisions.

Keywords: Organizational effectiveness, the Dayak Customary Council, and Duncan Theory

## A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan asas desentralisasi. Baik pemerintahan daerah, asas desentralisasi maupun otonomi daerah, adalah bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, agar setiap orang bisa hidup tenang, nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan

kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Otonomi Daerah sendiri adalah cara peningkatan keadilan, demokrasi dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa, meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan juga saling membangun kepercayaan antara masyarakat juga antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagaimana amanat Undang-Undang otonomi daerah terbaru Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Nomor 12 yang berbunyi "Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dari kutipan tersebut penulis menyadari bahwa peran masyarakat dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri memang harus dilaksanakan mengingat Masyarakat Adat di Indonesia memiliki Hukum Adat tersendiri yang kemudian dapat menjadi pedoman pendukung dalam menjalankan wewenang dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Otonomi Daerah menjadi penghubung antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Masyarakat Adat dan membentuk Lembaga

Adat serta yang menjadi payung dari kelompok Masyarakat Hukum Adat itu sendiri, maka partisipasi masyarakat dalam hubungannya dengan otonomi daerah tidak saja untuk melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tetapi juga Pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Dalam pembangunan kebudayaan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan, memelihara dan mengembangkan kebudayaannya melalui peran lembaga adat sendiri.

Kabupaten Ketapang merupakan tempat dimana peradaban suku-suku Dayak setempat bermula dan berada di bawah payung adat/lembaga adat Dewan Adat Dayak sebagai komunitas masyarakat adat yang sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dengan slogan “Adil Ka’ Talino Bacuramin Ka’ Saruga Basengat Ka’ Jubata” yang berarti “Bersikap Adil Kepada Sesama Manusia, Bercermin, Berpedoman dan Berpandangan Hidup Ke Surga dan Selalu Mengaitkan Tuhan Dalam Segala Kehidupan”. Dewan Adat Dayak sendiri adalah tempat pertemuan dari berbagai Sub suku Dayak yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan secara keseluruhan, sehingga Dewan Adat Dayak disebut sebagai payung adat/lembaga adatnya suku Dayak, yang kemudian menjadikan terciptanya kearifan lokal masyarakat Dayak di Kabupaten Ketapang.

Untuk mengetahui secara jelas Peran Lembaga Dewan Adat Dayak Penulis

melakukan Pengamatan 18 April 2019 dan 1 Mei 2019 di Sekretariat Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang untuk mencari program kerja serta masalah apa saja yang dihadapi dalam menjalankan peran Dewan Adat Dayak. Dengan meminta Data Program Kerja Dewan Adat Dayak Kepada Sekretariat Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang. Dari hasil Pengamatan penulis memang sudah banyak program yang di jalankan oleh lembaga Dewan Adat Dayak ketapang, namun ada beberapa masalah yang benar benar menjadi focus Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang dan menghambat Dewan Adat Dayak Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu :

- a) Di beberapa wilayah Kabupaten Ketapang masih terdapat permasalahan menyangkut tumpang-tindih kepentingan atas lahan-lahan masyarakat adat Dayak dengan perusahaan.
- b) Dalam bidang mediasi terkadang perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat, perusahaan tidak mau menerima hukum adat sebagai wadah penyelesaian sengketa antara perusahaan dan masyarakat dan lebih memilih hukum pidana sebagai jalan keluar.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **I. Efektivitas Organisasi**

Efektivitas menurut Ensiklopedia dalam Gie (1998,147) berasal dari kata efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang

dikehendaki dalam perbuatan. Efektivitas menurut Mohyi (1999,209) berarti tingkat ketepatan pencapaian suatu tujuan atau sasaran. Sedangkan organisasi oleh Indrawijaya (2012,6), diartikan sebagai suatu himpunan interaksi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang terikat di dalam ketentuan yang telah disetujui. Pendapat lain organisasi menurut Irawati (2013,10) adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Selain itu, menurut Siagian (2013,12) organisasi adalah segala bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan telah terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki antara seorang atau sekelompok yang disebut pemimpin dan seorang atau sekelompok yang disebut bawahan (karyawan).

Akhirnya, berdasarkan beberapa pengertian dari efektivitas dan organisasi tersebut penyusun simpulkan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat ketepatan atau keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sama antara pimpinan dan karyawan guna memenuhi kebutuhan bersama.

Ducan dalam steers (1985,53) berpendapat terdapat tiga indikator yang sangat mempengaruhi efektivitas, yaitu:

a) Pencapaian tujuan

Dalam hal ini keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

b) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Setelah penyusun memperoleh beberapa pendapat tentang indikator- indikator ini, disini penyusun memilih indikator-indikator yang dikemukakan oleh Steers dengan alasan indikator-indikatornya diperkuat oleh adanya penjelasan pada faktor-faktor efektivitas organisasi. Dimana kejelasan tujuan tergolong ke dalam karakteristik manajemen, filosofi dan sistem nilai tergolong ke dalam karakteristik organisasi, komposisi dan struktur tergolong ke dalam karakteristik pekerja, teknologi organisasi dan lingkungan organisasi tergolong ke dalam karakteristik lingkungan.

## II. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Syafrudin (2010,20) mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Ahmad Yani (2002,33) otonomi daerah adalah salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi empat faktor, antara lain:

a) Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar

hidup untuk semua negara seluruh dunia. Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu member sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

b) Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Lincoln Arsyad (2015,46) pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya, yang terdiri dari:

a) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

b) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biayabiaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

c) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan

pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Dan lebih jauh lagi, tujuan utama dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah dengan tidak hanya membatasinya pada konteks hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, maka semuanya bermuara pada pengaturan mekanisme hubungan antara Negara dan masyarakat. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan di daerah maupun didalam pelaksanaannya.

**Gambar 2.1.**

#### **Alur Pikir Penelitian**

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DAD Kabupaten Ketapang
- Undang Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Fenomena :

- Konflik perusahaan dan Masyarakat Adat, masih ada yang belum terselesaikan di daerah Kabupaten ketapang.
- Hukum adat, yang digunakan sebagai wadah penyelesaian masalah antara perusahaan dan masyarakat adat tidak diterima oleh Perusahaan sehingga membuat hukum adat dan undang undang Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2014, Pasal 1 Nomor 12 tidak

dapat berjalan beriringan dalam melindungi hak masyarakat adat.



Efektivitas Organisasi Duncan dalam zulkarnain (2012; 32)

- Pencapaian Tujuan
- Integrasi
- Adaptasi



Hasil yang hendak dicapai :

Efektivitas Organisasi Dewan Adat Dayak dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Terealisasi dengan baik sesuai Undang Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

#### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Secara harafiah penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang di tujukan untuk mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawanya adalah eksperimen dimana peneliti adalah instrument kunci (sugiyono, 2016,9). Penelitian ini adalah penelitian analisis statistic dengan menggunakan data primer dan sekunder

tentang Efektivitas Organisasi Dewan Adat Dayak Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

Teknik penentuan subjek yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik purposive. Teknik purposive adalah teknik penentuan subjek penelitian yang dianggap benar benar memiliki informasi yang di perlukan oleh penulis. Adapun yang menjadi subjek penelitian dengan teknik purposive adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah di Kantor Sekretariat Daerah, Karena menurut penulis pihak Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dinilai lebih menguasai tentang Otonomi Daerah Kabupaten Ketapang.
- b) Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris Lembaga Dewan Adat Dayak, Karena Ketua, Wakil Dan Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang adalah penggerak dalam berjalanya peran DAD, serta sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.
- c) Kepala Kesbangpol Kabupaten ketapang, Karena Kesbangpol dinilai mengetahui perkembangan Masyarakat adat di Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas Kesbangpol sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah dalam bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik, budaya agama serta Masyarakat adat.
- d) Dua orang Masyarakat Adat Dayak, Karena Masyarakat Adat lebih mengetahui apakah

Program DAD memang berjalan untuk kepentingan mereka atau mala sebaliknya.

Analisis data dalam metode kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017, 243), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu sebagai berikut :

- a) Reduksi data (*Data Deduction*)  
Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
- b) Penyajian data (*Data Display*)  
Yang Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi
- c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan tersebut kredibel.

Teknik keabsahan data dilakukan secara langsung oleh penulis di lapangan sehingga data yang di peroleh adalah data yang benar valid, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam penulisan ini untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan metode triangulasi. Menurut Sugiyono(2016, 439) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek dan kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan

data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiono, 2016, 274).

Teknik keabsahan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan triangulasi Sumber dan Teknik, yaitu menggali kebenaran sumber informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain dengan melakukan wawancara dan observasi, penulis dapat menggunakan observasi terlihat (participan observation), dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi serta foto. Masing masing cara itu akan menghasilkan bukti atau hasil yang berbeda yang kemudian akan memberikan pandangan (insight) berbeda pula mengenai fenomena yang di teliti. Penulis juga melakukan dokumentasi terhadap proses penelitian, seperti menyiapkan hasil wawancara dan foto selama penelitian. Dokumentasi penelitian berupa foto dari camera, rekaman dan catatan kecil dari buku saku.

## D. PEMBAHASAN

### I. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yang dimaksud dalam hal ini artinya keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan yang, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam pencapaian tujuannya. Karena sasaran tujuan penelitian ini adalah Masyarakat dan Perusahaan, maka seluruh

kegiatan operasional harus secara langsung tertuju pada Masyarakat dan Perusahaan serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Adat Dayak.

Informasi yang didapatkan peneliti melalui beberapa informan atau subjek dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu di sini yang dimaksud adalah pengambilan informasi dari informan yang dianggap paling tahu tentang apa informasi yang dibutuhkan peneliti. Terlebih dahulu peneliti akan mendeskripsikan tentang strategi apa saja yang dilakukan Dewan Adat Dayak Dalam mencapai tujuan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dalam hal ini adalah hak masyarakat Adat yang mengatur dan mengurus tanah mereka yang bersengketa dengan Perusahaan.

Dari pandangan peneliti Dewan Adat Dayak sudah bekerja dengan baik dalam menyelamatkan hak hak masyarakat adat, dimana masyarakat adat juga mengapresiasi kerja Dewan Adat Dayak. Dari sudut pandang pemerintahan sendiri terutama melihat dari pencapaian tujuan Dewan Adat Dayak dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah pasal 1 ayat 12, dimana dalam menyelamatkan kepentingan masyarakat, Dewan Adat Dayak sudah berusaha mempertahankan, memelihara dan mengembangkan masyarakat adat yang menjadi salah satu fungsi dari Dewan Adat

Dayak sendiri. Peneliti sendiri setuju jika Kinerja Dewan Adat Dayak dalam mencapai tujuan dikatakan baik karena kesigapan Dewan Adat Dayak dalam penanganan kasus sengketa lahan selalu dilakukan dengan cepat dan tepat walaupun terkadang hasilnya tidak memuaskan.

## II. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi. Sebagai Organisasi Masyarakat Adat, Dewan Adat Dayak juga mempunyai tujuan sehingga diperlukan suatu integrasi antara tujuan Dewan Adat Dayak sendiri dan Masyarakat adat, yang perlu diketahui apa yang menjadi kebutuhan masing-masing pihak. Peneliti mencari informasi tentang integrasi yang seperti apa saja yang telah dilakukan Oleh Dewan Adat Dayak dalam menyelesaikan sengketa lahan antara Masyarakat dan Perusahaan, berikut adalah beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan integrasi.

Menurut pengamatan peneliti, dalam hal integrasi Dewan Adat Dayak terlihat belum efektif, terutama dalam sosialisasi, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan bukanlah sosialisasi formal, menurut sosialisasi yang dilakukan Dewan Adat Dayak belum sepenuhnya bisa di mengerti oleh masyarakat apalagi masyarakat

yang belum mengerti tentang undang undang dan hak masyarakat adat, seharusnya sosialisasi tersebut dilakukan di waktu yang berbeda agar hasilnya pun dapat lebih optimal. Dari sudut pandang pemerintahan integrasi yang dilakukan oleh Dewan Adat Dayak terutama tentang hubungan Masyarakat adat dan Perusahaan terlihat belum berjalan dengan baik, terutama dalam kasus sengketa lahan yang masih sering terjadi berulang ulang sehingga peran pemerintah dalam hal ini untuk menjalankan tujuan dari undang undang otonomi daerah belum bisa sejalan dengan fungsi Dewan Adat Dayak.

### III. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasinya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Adaptasi Dalam Dewan Adat Dayak sendiri berarti proses perubahan dan akibatnya pada anggota Dewan Adat Dayak sehingga Anggota tersebut dapat berfungsi sesuai tugas dan fungsinya dan bisa bekerja lebih baik dalam lingkungan Dewan Adat Dayak, yang kemudian dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan Dewan Adat Dayak dan tugasnya bertujuan untuk kesejahteraan dan keamanan Masyarakat Adat.

Menurut sudut pandang peneliti Kenaggotaan Dewan Adat Dayak yang sekarang sudah lebih baik karena pemilihan anggota

Dewan Adat Dayak sudah melalui seleksi kaderisasi dan di sesuaikan dengan bidang bidang yang di tekuni masing masing anggota di dalam bidang bidang yang telah dibagi. Dari hasil wawancara dengan dua orang masyarakat Adat Dayak pun terlihat bahwa struktur keanggotaan yang sekarang sudah lebih baik dengan kesigapan anggota yang sekarang terhadap kasus kasus masyarakat Adat Dayak.

Menurut pengamatan peneliti bahwa adaptasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Adat Dayak memang sudah di sesuaikan dengan kemampuan anggota dalam bidang tertentu dalam berkoordinasi yang kemudian dapat membantu anggota Dewan Adat Dayak beradaptasi dengan lebih cepat. Ditambah lagi dengan adanya kaderisasi anggota dapat langsung dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang yang memang berada dalam bidangnya yang kemudian dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Adat Dayak dalam menegakan kesejahteraan dan hak Masyarakat Adat serta memberikan rasa aman kepada mereka. Dari sudut pandang pemerintahan, Adaptasi yang dilakukan Dewan Adat Dayak mengenai keahlian dan kemampuan anggotanya harus di tingkatkan lagi agar kemudian keahlian masing masing anggota Dewan Adat Dayak dapat segera menyesuaikan dengan program program pemerintah terutama dalam kebijakan Otonomi Daerah.

## E. KESIMPULAN

Berikut adalah simpulan peneliti berkenaan dengan Efektifitas Organisasi Dewan Adat Dayak dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Yaitu:

### I. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan Dewan Adat Dayak dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, sudah baik namun Belum Efektif dikarenakan strategi dalam mencapai tujuan yang dilakukan oleh Dewan Adat Dayak masih belum terealisasi dengan baik. Jika dilihat dari sudut pandang Pemerintahan sendiri terutama melihat dari pencapaian tujuan Dewan Adat Dayak dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah pasal 1 ayat 12, di dalam menyelamatkan kepentingan masyarakat, Dewan Adat Dayak sudah berusaha mempertahankan, memelihara dan mengembangkan masyarakat adat yang menjadi salah satu fungsi dari Dewan Adat Dayak sendiri, namun dalam hasil akhirnya fungsi Dewan Adat Dayak dan tujuan dari otonomi daerah tidak dapat berjalan beriringan dikarenakan hukum adat yang di berikan Dewan Adat Dayak tidak terealisasi yang kemudian menghambat tujuan pemerintah yang tertuang dalam Undang undang otonomi daerah didalam menyelamatkan kepentingan masyarakat.

### II. Integrasi

Pada pola Integrasi Dewan Adat Dayak masih memiliki keterbatasan terutama dalam bidang sosialisasi, Sosialisasi yang

Lakukan Dewan Adat Dayak masih terbatas dalam arti Dewan Adat Dayak hanya bersosialisasi dengan batas waktu yang singkat saat setelah kegiatan memberikan hukuman kepada Pihak yang bersalah. Artinya tidak ada pemahaman mendalam yang diberikan Dewan Adat Dayak kepada masing masing pihak saat kedua belah pihak di pertemuan, yang kemudian resiko kemungkinan terjadinya kembali sengketa lahan Masyarakat Adat dan Perusahaan masih tinggi. Dari sudut pandang pemerintahan integrasi yang dilakukan oleh Dewan Adat Dayak terutama tentang hubungan Masyarakat adat dan Perusahaan terlihat belum berjalan dengan baik, terutama dalam kasus sengketa lahan yang masih sering terjadi berulang ulang sehingga peran pemerintah dalam hal ini untuk menjalankan tujuan dari undang undang otonomi daerah belum bisa sejalan dengan fungsi Dewan Adat Dayak.

### III. Adaptasi

Pada saat melakukan Adaptasi dalam mencapai tujuan Efektivitas Organisasi Dewan Adat dayak Dalam Menunjang Pelaksanaan otonomi Daerah, Dewan Adat Dayak sudah melakukan hal yang baik menurut peneliti dengan menempatkan anggota anggota sesuai dengan keahliannya dalam bidang bidang yang telah di tetapkan oleh Dewan Adat Dayak, ditambah lagi dengan adanya Kaderisasi akan semakin memperkuat anggota Dewan Adat Dayak dalam memahami tugas dan fungsinya

namun walaupun sudah sesuai dengan keahlian anggota dalam masing masing bidang anggota Dewan Adat Dayak. Dari sudut pandang pemerintahan, Adaptasi yang dilakukan Dewan Adat Dayak mengenai keahlian dan kemampuan anggotanya hanya terbatas pada bidang bidang yang telah di tetapkan, yang kemudian peneliti melihat bahwa pemahaman tentang pemerintahan terutama konsep otonomi daerah masih kurang di dalam organisasi.

## F. REFERENSI

Ahmad, Yani.2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.

Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Duncan dalam Steers, R. M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. dalam Zulkarnain. 2012., Jakarta

Gie,The Liang .1998. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta.

Indrawijaya, A. I. 2012. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.

Irawati, N. 2013. *Hubungan Kualitas Pegawai dengan Efektivitas Organisasi*.

Katz, Daniel & Kahn, Robert L. 2006. *The Social Psychology of Organizations*. Dalam

*Becker & Neuhauser The Efficient Organizations*.New York. Elsevier.

Lincolin. 2015. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kelima*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mohyi. 1999. *Teori dan Perilaku Organisasi*. Malang: UMM Press.

Josep Riwu Kaho. 2010. *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*,Bina Aksara Jakarta.

Sarwono, S.W, 2002. *Teori-teori Psikologi Sosial* . PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Siagian, 2008, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Bumi aksara, jakarta.

S.P Siagian, 2013, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Bumi aksara, jakarta

Steers, Richard M. And Lyman W. Porter. 2006. *Efektifitas Organisasi*, Terjemahan Magdalena Janin, Jakarta: Erlangga.

Syafrudin, Ateng. 2010. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Pembangunannya*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama.

Wenny, Cherrya. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota* Volume 2, No. 1.

Yuliantini, Heny. 2012. *Otonomi Daerah*.

Skripsi :

Agus Jaelani, 2005 Keberadaan Lembaga Adat Dalam Konsep Otonomi Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Wonobodo Kecamatan Blado Kabupaten Batang

Rhony Andrhes Linthin, 2015 Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung, FOKUSMEDIA

**Lain lain:**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat

